**ABSTRAK**

 Asas desentralisasi yang memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua yang bersangkutan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sesuai undang-undang yang berlaku termasuk kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar mempermudah proses pengelolaan data keuangan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban keuangan.

 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan telah dilaksanakan secara online melalui komputer sejak tahun 2015 dalam pengelolaan keuangan di seluruh SKPD dan telah mendapatkan prestasi yang cukup baik atas penyajian laporan keuangannya namun pada pelaksanannya dilapangan masih terdapat kelemahan pada aplikasi SIMDA terkhusus masalah sarana penunjang dan sumber daya yang handal dalam mengoperasikan SIMDA Keuangan. Atas dasar ini lah penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan juduk penelitian **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BIDANG KEUANGAN DALAM MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi magang untuk penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

 Efektivitas SIMDA Keuangan terdiri dari keamanan data, waktu, ketelitian, laporan dan output dan relevansi data. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam efektivitas penggunaan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Banjarbaru, melaksanakan sosialisasi SIMDA Keuangan bagi setiap SKPD, Pelaksanaan Bimtek SIMDA satu kali setahun, Pengadaan sarana pendukung SIMDA Keuangan di setiap SKPD.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, SIMDA Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**ABSTRACT**

 The principle of decentralization which gives central government authority to local governments to manage all concerned with the main tasks and functions of local government in accordance with applicable law including the obligation to utilize information technology in order to facilitate the process of managing financial data in the framework of development and implementation of financial accountability system.

 Implementation of SIMDA Finance application has been implemented online through computer since 2015 in the management of finance in all SKPD and has gained quite good achievement on presentation of its financial statements but on the implementation of the field there is still a weakness in the application SIMDA specially the problem of supporting facilities and resources that are reliable in operates SIMDA Finance. On the basis of this is the author wants to do further research with research juduk **"EFFECTIVENESS OF USAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) FINANCIAL SECTOR IN PRODUCING FINANCIAL REPORT IN THE GOVERNMENT OF CITY BANJARBARU PROVINCE SOUTH KALIMANTAN"**

 This research was conducted by using qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation, while data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion. The location of the apprenticeship for this research is the Regional Financial and Asset Management Board (BPKAD) of Banjarbaru City, South Kalimantan Province.

 The effectiveness of SIMDA Finance consists of data security, time, accuracy, reporting and output and data relevance. The efforts made by the Regional Finance and Asset Management Agency in the effectiveness of the use of SIMDA Finance in Banjarbaru City Government, Socialize SIMDA Finance for each SKPD, Implementation of Bimtek SIMDA once a year, Procurement of SIMDA Finance support facilities in each SKPD.

**Keywords: Effectiveness, Usage, SIMDA Finance, Financial Management Agency and Regional Assets**